

KATA PENGANTAR



Puji Kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2022 ini mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun tahun sebelumnya, disamping itu juga merumuskan program/kegiatan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun Lalu, Tujuan sasaran Peangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2022 merupakan dokumen Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Tanjung Pati, Oktober 2021

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Kepala,

AMBARDI, SE.MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19631216 199003 1 005

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN -----	1
	1.1. Latar belakang	
	1.2. Landasan Hukum -----	3
	1.3. Maksud dan tujuan -----	6
	1.4. Sistematika Penulisan -----	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN 2017 -----	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra -----	8
	2.2. Capaian Renstra -----	24
	2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD -----	33
BAB III	TUJUAN SASARAN Program dan Kegiatan DPMPTSP -----	43
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota -----	48
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD -----	56
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP -----	59
BAB V	PENUTUP -----	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah-----	16
Tabel 2.2	Target Indikator Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021 ----- 24	
Tabel 2.4	Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. -----	35
Tabel 3.1	Tabel Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya -----	49
Tabel 3.2	Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP -----	57
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 -----	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan kegiatan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah diubah dengan Undang –undang Nomor 2 Tahun 2015, telah diwajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja OPD digunakan sebagai dasar pentusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang menjadi ddasar untuk pentusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan juga dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Rencana Kerja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga pentusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Pedoman kerja merupakan dokumen perencanaan kegiatan OPD Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022.
3. RENJA merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DPMPTSP Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun Tahun berjalan;

2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Landasan hukum penyusunan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Terpadu.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 48).
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai ketehubungan dengan Renstra DPMPTSP dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA DPMPTSP Tahun 2022 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN 2020**, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Aanalisa kinerja perangkat daerah.
- BAB III TUJUAN, SASARAN DPMPTSP**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, Program dan keiatan di Tahun 2022.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP**, berisi rencana kerja Program dan kegiatan DPMPTSP tahun 2022, Rencana Kerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2022 RPJMD dan Renstra DPMPTSP, Rekapitulasi rencana pendanaan Perangkat daerah.
- BAB V PENUTUP**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021. Rencana Kerja juga merupakan alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akunabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahun 2020.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 2 (dua) urusan wajib, yaitu Urusan Penanaman Modal dan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021.

Berdasarkan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp. 551.300,- dengan 98,30% keuangan sebesar 96,06% dari pagu anggaran Rp. 620.349.541,-.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA SKPD dan capaian RENSTRA SKPD diuraikan dalam pokok pokok materi sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang diencanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Urusan Penanaman Modal

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. **Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**, alokasi dana Rp. 1.200.000 Realisasi keuangan Rp. 1.200.000 (100 %) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kelengkapan pendukung jasa surat menyurat, dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya aktifitas surat menyurat perkantoran.
2. **Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**, alokasi dana Rp. 42.271.542, Realisasi keuangan Rp. 36.270.128 (85,80%) dan Realisasi fisik 85,80 %, keluaran dari kegiatan ini adalah adanya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik kantor dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik kantor.
3. **Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**, alokasi dana Rp. 7.000.000 realisasi keuangan Rp. 4.539.600 (64,85%) dan realisasi fisik 64,85% , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya pengurusan STNK atas 5 unit mobil dinas/operasional dan 15 kendaraan dinas sepeda motor dengan Capaian Kinerja berupa terbayarnya pajak kendaraan dinas dan operasional.
4. **Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**, alokasi dana Rp. 229.275.000 Realisasi keuangan Rp.227.765.000 (99,34%) dan Realisasi fisik 99,34 %, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kelancaran penyelenggaraan administrasi keuangan pada sekretariat dan terbayarnya honor pengelola kegiatan,gaji dua orang pegawai tidak tetap dan gaji empat orang tenaga harian lepas dengan Capaian Kinerja berupa tertibnya administrasi keuangan kantor.
5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**, alokasi dana Rp. 10.776.000,- Realisasi keuangan Rp. 10.776.000 (100%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kebersihan dan terpenuhinya pembayaran honor petugas kebersihan, Capaian Kinerja berupa terciptanya suasana kantor yang bersih dan nyaman.
6. **Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor**, alokasi dana Rp. 24.149.125.-Realisasi keuangan Rp. 24.147.500,- (99,99%) dan Realisasi fisik 99,99%, keluaran dari kegiatan

ini adalah tersedianya alat tulis kantor dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran.

7. **Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan**, alokasi dana Rp. 18.357.100,- Realisasi keuangan Rp. 18.357.000,- (100%) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran.
8. **Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, alokasi dana Rp. 2.500.000 Realisasi keuangan Rp. 2.500.000,- (100%) dan Realisasi fisik 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor dengan Capaian Kinerja berupa berfungsinya alat-alat listrik dan penerangan kantor.
9. **Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman**, alokasi dana Rp. 5.727.500,- Realisasi keuangan Rp. 5.693.000,- (99,40%) dan Realisasi fisik 99,40 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minuman tamu dan rapat pada DPMPTSP selama tahun anggaran 2019 dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya rapat-rapat dan terlayannya tamu kantor.
10. **Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**, alokasi dana Rp. 94.033.500,- Realisasi keuangan Rp. 94.031.000,- (100%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan Capaian Kinerja berupa teriptanya sinergi antar berbagai instansi.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. **Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**, alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% , kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan ealokasi anggaran dalam percepatan penanganan Corona Virus (Covid-19).
2. **Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**, alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% , kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk

dalam refocussing kegiatan dan ealokasi anggaran dalam percepatan penanganan Corona Virus (Covid-19).

3. **Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**, alokasi dana Rp. 21.913.000,- realisasi keuangan Rp. 21.908.000,- (99,98,%) dan Realisasi fisik 99,98%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya operasional, terpeliharanya service dan suku cadang kendaraan dinas operasional DPMPTSP dengan Capaian Kinerja berupa terpeliharanya kendaraan dinas operasional.
4. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**, alokasi dana Rp. 3.595.000,00 realisasi keuangan Rp 3.585.000,- (99,72%) dan Realisasi fisik 99,72%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor terdiridariservis/perbaikan laptop, komputer, mesin tik dan *air conditioner (AC)* dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran.
5. **Kegiatan RehabilitasSedang / Berat Gedung Kantor**, alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% , kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan ealokasi anggaran dalam percepatan penanganan Corona Virus (Covid-19).

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. **Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**,alokasi dana Rp. 14.930.000,- Realisasi keuangan Rp. 14.870.000 (99,60%) dan Realisasi fisik 99,60%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya DPA 2020, LKJIP Tahun 2019, PK dan lampiran Tahun 2020, Renja SKPD Tahun 2021, LKPJ, LPPD, EKPPD Tahun 2019, DPPA Tahun 2020, IKU Kepala OPD tahun 2020 dengan Capaian Kinerja berupa tersedianya dokumen anggaran dan bahan evaluasi.
2. **Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun**,alokasi dana Rp. 748.000 realisasi keuangan Rp. 748.000 (100%) dan realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan semester Tahun 2020 dan laporan keuangan akhir tahun 2020 DPMPTSP dengan Capaian Kinerja berupa tersedianya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun DPMPTSP yang akuntabel.

IV. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. **Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah**, alokasi dana Rp. 18.785.500,- Realisasi keuangan Rp. 18.785.500,- (100%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah 100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet,Rif/forum investmen. Karena refocussing anggaran target tidak tercapai dan untuk konsultasi dan koordinasi potensi investasi Kabupaten Lima Puluh Kotadapat terlaksana
2. **Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA**, alokasi dana Rp. 3.005.000,- Realisasi keuangan Rp. 3.005.000,- (100%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Promosi dan Kerjasama Investasid engan Capaian Kinerja berupa Terwujudnya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. **Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**, dengan alokasi dana Rp. 12.865.624, realisasi keuangan Rp. 12.865.624,- (100%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal melalui Tim Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja berupa meningkatnya koordinasi pemantauan,pembinaan,pengawasan, dan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal di daerah dan terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berkala.
4. **Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi**, alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% , kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan ealokasi anggaran dalam percepatan penanganan Corona Virus (Covid-19).
5. **Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal**, alokasi dana Rp. 10.075.000 Realisasi keuangan Rp. 10.050.000,-(100%) dan Realisasi fisik 100%, kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal terhadap aparaturn dan masyarakat. Unsur peserta dalam sosialisasi

ini terdiri Aparatur Kecamatan, Aparatur Nagari, Unsur dari BAMUS, Ketua KAN, Wali Jorong dan Pelaku Usaha. Namun hal ini belum terlaksana karena adanya refocussing anggaran.

- 6. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Promosi Investasi Daerah**, alokasi dana Rp. 7.685.000,- realisasi keuangan Rp.7.685.000,- (100%) dan realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah 1 buah rak brosur display, 3 rim brosur, sarana dan prasarana pameran, x banner/ y banner/roll banner, pembayaran honor THL. Berhubung karena refocussing anggaran , kegiatan yang terlaksana hanya pembayaran honor THL

V. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- 1. Kegiatan pengembangan system informasi penanaman modal**, alokasi dana Rp. 5.310.000,- realisasi keuangan Rp. 5.310.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengolahan data dan informasi di bidang penanaman modal sebanyak 19 laporan.
- 2. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah**, alokasi dana Rp. 11.325.300,- Realisasi keuangan Rp. 11.325.300,- (100%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah terimplementasikannya system pelayanan secara elektronik (4 sistem aplikasi perizinan) dengan Capaian Kinerja berupa meningkatnya Pelayanan Informasi dan Pelayanan Perizinan seara elektronik di Bidang Penanaman Modal.
- 3. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Pelayanan Penanaman Modal**, alokasi dana Rp.29.397.350,- realisasi keuangan Rp. 29.397.350,-(100%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan perizinan dan terlaksananya peninjauan lapangan terhadap usaha masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perizinan di kabupaten lima puluh kota.
- 4. Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal**, alokasi dana Rp. 8.845.000,- Realisasi keuangan Rp. 8.845.000,- (100%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari

kegiatan ini adalah terlaksananya pembuatan Perbup pendelegasian wewenang pelayanan dan Perbup Persyaratan Perizinan Penanaman Modal dengan Capaian Kinerja berupa tersedianya pendelegasian wewenang pelayanan dan persyaratan perizinan penanaman modal.

5. **Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**, alokasi dana Rp. 12.700.000,- Realisasi keuangan Rp. 12.700.000,- (100%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal yang mencakup Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan Capaian Kinerja berupa tersedianya data realisasi investasi penanaman modal melalui pengumpulan data, verifikasi dan evaluasi LKPM.
6. **Kegiatan Operasional Pelayanan Investasi Daerah**, alokasi dana Rp. 8.155.000,- Realisasi keuangan Rp. 8.155.000,- (100%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Operasional Investasi Daerah untuk menunjang operasional Penyelenggaraan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan memfasilitasi calon investor dengan Capaian Kinerja berupa Terlayani dan terfasilitasi calon investor dalam pengurusan izin Penanaman Modal.

VI. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

1. **Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan investasi** , alokasi dana Rp. 15.725.000,- realisasi keuangan Rp. 15.725.000,- (100%) dan realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyusunan Data Potensi Investasi dengan Capaian Kinerja berupa Adanya Data Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi.
3. Realisasi program/kegiatan kinerja yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - a. Nilai rencana investasi mikro dan kecil dengan capaian 120,55% dari target 70M Realisasi Rp. 84,39M.

- b. Nilai realisasi investasi mikro dan kecil dengan capaian 173,6% dari target 60M realisasinya 104,16M
 - c. Nilai realisasi investasi menengah dan besar dengan capaian 316,52% dari target 80M, realisasinya 253,22M
 - d. Skor Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 102% dari tager B (84,50) realisasi B (84,68)
 - e. Nilai AKIP OPD sebesar 102,6% dari target 68 realiasi 69,08
4. Realisasi program/kegiatan yang tidak tercapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
- a. Nilai realisasi rencana investasi Menengah dan Besar 30% dari Target 400M, realisasunya 120M
 - b. Nilai realisasi investasi Mikro dan Kecil sebesar 70% dari target 60M , realisainya 42M
 - c. Nilai Realisasi Investasi Menengah dan Besar sebesar 52,5% dari taget 80M, realisasinya 42M
 - d. Jumlah investor PMDN (mikro kecil) 21,2% dari target 2010 investor realiasi 534 investor
5. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:
- a. Jaminan stabilitas politik

Indek Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu persentase peningkatan nilai investasi, persentase peningkatan realisasi investasi , skor IKM . Untuk pencapaian target kinerja IKU dipengaruhi oleh factor politik, karena usaha membutuhkan dunia politik stabil untuk merealisasikan rencana investasi dan hal ini juga akan berpengaruh untuk realisasi investasi.
 - b. Keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti
Keamana dan penegakan hukum yang konsisten mempengaruhi capaian kinerja karena investor akan ragu untuk berinvestasi di daerah kita
6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Mdal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran pelayanan masyarakat Kabupaten Lima puluh Kota pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan
7. Kebijakan/tindakan perencanaan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelaksanaan program/kegiatan
 - d. Membuat regulasi dan kajian berupa Fisibility Study

Tabel. 2.1
Tabel evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah

Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5		7		10		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
Meningkatnya Nilai AKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perseintase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	98%	676.500.000	98%	435.289.767		120.464.886					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa komunikasi	1 Thn	4.500.000	1 Thn	1.200.000	3 bulan			2.786.000		0,619	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	50.000.000	12 bulan	42.271.542	3 bulan	12.997.636		23.489.570		0,470	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas / operasional	20 surat	15.000.000	1 Tahun	7.000.000	3 surat	1.729.250		6.130.000		0,409	

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah petugas pengadministrasian Keuangan	12 bln	250.000.000	12 bulan	229.275.000	3 bulan	91.280.000		196.054.000		0,784	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan petugas jasa kebersihan dan jumlah jenis peralatan pembersih	1 thn	26.000.000	1 Tahun	10.776.000	3 bulan	980.000		19.069.000		0,733	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis penyediaan Alat tulis kantor	1 thn	34.000.000	1 Tahun	24.149.125	3 bulan	1.978.000		11.016.700		0,324	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	12 bln	30.000.000	1 Tahun	18.357.100	3 bulan	1.500.000		13.161.100		0,439	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat - alat listrik dan elektronik	12 bln	15.000.000	1 Tahun	2.500.000	3 bulan	0		5.000.000		0,333	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	1 thn	17.000.000	1 Tahun	5.727.500	3 bulan	0		3.528.000		0,208	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi	1 thn	235.000.000	1 Tahun	94.033.500	3 bulan	10.000.000		330.051.707		1,404	
Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	98%	135.000.000	0,67	25.508.000		0					
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 sebagai penunjang operasional DPMPTSP	-	-	-	-	-	-		-		#DIV/0!	

	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 Meja Kerja, 2 Kursi Kerja, 1 Lemari Arsip, 1 Filling Kabinet	19.000.000	-	-	-	-	10.000.000	0,526
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 Laptop/Note Book, 5 Printer / Plotter	28.000.000	-	-	-	-	19.173.800	0,685
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	1 Thn	74.000.000	1 Tahun	21.913.000	3 bulan	0	41.892.500	0,566
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Service AC dan Mesin TIK	14.000.000	1 Tahun	3.595.000	3 bulan	0	5.970.000	0,426
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Paket rehabilitasi gedung/kantor	-	-	-	-	-	-	279.305.000	#DIV/0!
Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	98%	120.000.000	-	-	-	-		
	Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah pengadaan mesin absensi		-	-	-	-	-		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	60 stel	60.000.000	-	-	-	-		
	Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	60 stel	60.000.000	-	-	-	-		

Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	98%	26000000	-	0		-					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang	26.000.000	18 orang	-		-		40.495.100		1,558	
Meningkatnya Nilai AKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Pelaporan Kecapaian Kinerja dan Keuangan	98%	83.000.000	0,41	15.678.000		0					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, LKJIP, Renja, RKA, DPA, , LKPJ,LPPD, EKPPD)	9 Dokumen	65.000.000	9 Dokumen	14.930.000	-	0		33.282.900		0,512	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas akhir tahun	3 Laporan	18.000.000	3 Laporan	748.000	-	0		5.279.500		0,293	
Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90(A)	328.000.000	85(A)	48.877.650		0					
	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah Pelaksanaan Peninjauan lokasi dan Rakor Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk umum, mikro dan kecil	2200 izin usaha menengah dan kecil - 13 izin usaha menengah dan besar	185.000.000	- 2500 izin usaha menengah dan kecil - 10 izin usaha menengah dan besar	29.397.350	1600 izin usaha menengah , 8 izin usaha menengah dan besar	0		161.208.603		0,871	

	Operasional Pelayanan Investasi Daerah	Jumlah operasional pelayanan investasi daerah	Tim Teknis Perizinan - 2200 Pelaku Usaha Mikro & Kecil - 22 Pelaku Usaha Menengah & Besar	75.000.000	Orang tim teknis PTPS dari 23 perangkat daerah/ instansi terkait, 1 orang penanam modal asing (PMA) dan 10 orang penanam modal dalam negeri (PMDN)	8.155.000	Orang tim teknis PTPS dari 9 perangkat daerah/ instansi terkait, 1 orang penanam modal asing (PMA) dan 10 orang penanam modal dalam negeri (PMDN)	0		49.357.500		0,658
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah sistem informasi penanaman modal di daerah	4 sistem aplikasi	68.000.000	3 Sistem aplikasi perizinan	11.325.300	4 sistem aplikasi	0		20.853.000		0,307
Meningkatnya Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	580 Milyar	435.000.000		52.416.124		0				
	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah buku potensi unggulan daerah	100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet	130.000.000	7 produk unggulan daerah	18.785.500	5 produk unggulan daerah	0		122.753.000		0,944
	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian	Jumlah koordinasi antar lembaga dalam pengendalian	18 Investor	65.000.000	21 Kali Koordinasi	3.005.000	8 Kali Koordinasi	0		25.200.000		0,388

	pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	pelaksanaan investasi PMDN / PMA											
	Peningkatan sarana prasana promosi investasi daerah	Jumlah pembuatan sapras dan bahan materi promosi	1 buah rak brosur display, 3 rim brosur, sarana dan prasarana pameran, x banner/ y banner/ roll banner, pembayaran honor THL	85.000.000	Investasi potensi dan produk unggulan daerah	7.685.000	Investasi potensi dan produk unggulan daerah	0		-		-	
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah event pameran lokal maupun nasional	5 Pameran	155.000.000	2 Kali pameran investasi	-		-		23.179.000		0,150	
Meningkatnya Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	580 Milyar	95.000.000		8.845.000		0					
	Kajian Kebijakan penanaman modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	3 Kebijakan	95.000.000	2 Kebijakan	8.845.000	1 kajian	0		30.971.500		0,326	
Meningkatnya Investasi	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	120 Milyar	54.000.000		15.725.000							
	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah kebijakan / kajian tentang potensi daerah yang terkait investasi	1 Laporan	29.000.000	1 Dokumen	15.725.000	1 Laporan	0		23.827.000		0,822	

	Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah	Jumlah buku statistik investasi daerah	100 buku	25.000.000	70 buku	-		-					
Meningkatnya Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	160 Milyar, 3011 Investor	145.000.000		22.940.624		0					
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	30 Investor	87.000.000	40 kali pelaksanaan, 1 kali	12.865.624	10 kali pelaksanaan	0		36.473.000		0,419	
	Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan penanaman modal	3 kecamatan	58.000.000	1 Pertemuan	10.075.000	1 kecamatan	0		64.084.600		1,105	
Meningkatnya Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	160 Milyar, 3011 Investor	105.000.000		18.010.000		0					
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jumlah pengembangan sistem informasi penanaman modal	19 Laporan	45.000.000	19 Laporan	5.310.000	3 Laporan	0		31.488.000		0,700	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan Monev Perijinan	50 perusahaan	60.000.000	20 kali pelaksanaan	12.700.000	11 kali perusahaan	0		44.975.000		0,750	

2.2 Capaian Renstra DPMPTSP

Tabel. 2.2

**Target Indikator sasaran
Renstra DPMPTSP Tahun 2016 - 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Nilai Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya investasi	Nilai Rencana Investasi (Milyar)					
			- Nilai Rencana Investasi Mikro dan Kecil	40	50	60	70	80
			- Nilai Rencana Investasi Menengah dan Besar	100	200	300	400	500
			Nilai Realisasi Investasi (Milyar)					
			- Nilai Realisasi Investasi Mikro dan Kecil	30	40	50	60	70
			- Nilai Realisasi Investasi Menengah dan Besar	50	60	70	80	90
			Jumlah Investor					
			- PMA	10	10	10	10	10
			- PMDN					
			- Mikro dan Kecil	1000	1500	2000	2500	3000

2	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	70 (B)	75 (B)	80 (B)	85 (A)	90 (A)
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan OPD	66	67	68	69	70

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya investasi	Nilai rencana investasi (Milyar)				
		- Nilai rencana investasi mikro dan kecil	70	84,39	120,55	Sangat Tinggi
		- Nilai Rencana Investasi Menengah dan besar	400	279,34	69,83	Sangat Tinggi
		Nilai realisasi investasi (milyar)				
		- Nilai realisasi investasi mikro dan kecil	60	104,16	173,6	Sangat Tinggi
		- Nilai realisasi investasi menengah dan besar	80	253,22	316,5	Rendah

		Jumlah investor - PMA - PMDN (Mikro kecil)	1 2500	0 611	0 24,44	Kurang Rendah
2	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Skor indeks kepuasan masyarakat	A (85)	B(84,79)	99,75	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTP	Nilai AKIP OPD	69	69,08	100,11	Sangat Tinggi
Rata rata Capaian Indikator						

C. Analisis dan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Investasi

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
1	Nilai rencana investasi (Milyar)						
	- Nilai rencana investasi mikro dan kecil	60	65,41	109,02	70	84,39	120,55
	- Nilai Rencana Investasi Menengah dan besar	300	424,67	141,55	400	279,34	69,83
	Rata-rata capaian nilai rencana investasi						155,46
	Nilai realisasi investasi (Milyar)						
	- Nilai realisasi investasi mikro dan kecil	50	65,41	125,28	60	104,16	173,6
	- Nilai Realisasi Investasi Menengah dan besar	70	42,41	130,83	80	253,22	316,5
	Rata-rata capaian realisasi investasi						331,85
	Jumlah Investor						
	- PMA	1	0	60,59	1	0	0

PMDN (Mikro,kecil)	1500	653	95,17	2500	611	24,44
Rata rata capaian investor						12,12

Rata rata capaian indikator : 139,87

1. Nilai Rencana investasi

Nilai investasi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan daerah masa yang akan datang (rencana). Angka diatas berdasarkan berdasarkan SIUP, Izin Prinsip, dan Nomor Induk Berusaha. Dari tabel diatas dapat dilihat, persentase capaian nilai rencana investasi Tahun 2019, 120,55%. Tahun 2020, nilai rencana investasi sebesar 363,73M (Mikro kecil, menengah besar)dengan rata rata persentase capaian sebesar 155,49%. Dimana terjadi kenaikan sebesar 30,21%. Kegiatan yang mendukung peningkatan nilai rencana investasi adalah Pengembangan potensi unggulan daerah, Penyelenggaraan pameran investasi, Peningkatan sarana prasarana promosi daerah. Untuk kegiatan ini tidak ada anggaran nya hal ini disebabkan karena adanya

Reforcussing Anggaran, meskipun demikian nilai rencana investasi meningkat.

2. Nilai Realisasi investasi tahun 2020 sebesar 357,38M (Mikro kecil dan Menengah, besar) rata rata pesentase capaian sebesar 244,56%. Tahun 2019 sebesar 107,82M (Mikro kecil , dan Menengah besar) dengan rata rata persentase capaian sebesar 95,17%. Hal ini terjadi kenaikan sebesar 149,39%. Peningkatan ini disebabkan oleh bebarapa hal :

1. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disampaikan oleh investor.
2. Sistem pelaporan, dari manual ke on-line. Bila masyarakat/investor lebih paham maka akan dapat meningkatkan nilai realisasi investasi
3. Meningkatnya pelaksanaan pengendalian kepada setiap pelaku usaha yang ada.

Akses bagi investor untuk menyampaikan LKPM, dimana sampai saat ini sudah ada hak akses investor untuk akses ke LKPM. Ada beberapa kegiatan yang mendukung meningkatnya Realisasi Investasi yaitu: Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMDA, Peningkatan kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk kegiatan ini tidak ada anggarannya hal ini disebabkan karena adanya Reforcussing Anggaran, meskipun demikian nilai realisasi investasi meningkat.

1. Foto Pelayanan pemohon dalam pengurusan izin



2. Foto Peninjauan Lokasi PT. Koto Alam Sejahtera di Kecamatan Pangkalan Koto Baru



Jumlah Investor

Pada Tahun 2019 jumlah investor sebanyak 653 investor, sedangkan di tahun 2020 sebanyak 534 investor, berarti terjadi penurunan jumlah investor sebanyak 19.PMA 0, PMDN 19. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal :

1. Jaminan stabilitas politik.
2. Virus Covid-19
3. Keamanan dan penegakan hokum yang konsisten belum terwujud secara pasti.

Dan yang menjadi factor penghambat bagi investor untuk menanamkan modal nya adalah : Kesulitan investor untuk mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Skor IKM	80	81,17	85	84,79	Nilai

a. Indikator Kinerja 1 :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan tolok ukur evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk masa berikutnya. Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 mencapai nilai skor **84,79** dari target nilai capaian yang ditetapkan sebesar **85**. Ini berarti skor capaian dari target yang ditetapkan tahun 2020 mencapai 99,75%, yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 berada dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja

DPMPTSP

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Nilai AKIP OPD	68	69,08	69	69,08	Nilai

Dalam penilaian akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan memperhatikan beberapa indikator penilaian dan bobot. Bobot dan Nilai DPMPTSP Tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Indikator Penilaian	Bobot%	Nilai %
1	Perencanaan kinerja	30	23,17
2	Pengukuran kinerja	25	13,75
3	Pelaporan kinerja	15	9,67
4	Evaluasi internal	10	5,50
5	Pencapaian sasaran/kinerja organisasi	20	16,99

Dilihat dari tabel diatas maka capaian 5 indikator kinerja sasaran strategis sebesar **69,08** dengan rata rata capaian **13,81**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran ini termasuk berhasil dengan kategori penilaian B .

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota, DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Pembinaan dan Pengkoordinasian penerapan standar teknis Perizinan Terpadu;
3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
6. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP lebih difokuskan pada pelayanan administrasi perizinan yang dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan nilai investasi dan realisasi investasi yang kinerjanya diukur diukur dari peningkatan nilai investasi dan peningkatan realisasi investasi setiap tahunnya, baik itu dari segi prosentase pertumbuhan jumlah PMA dan PMDN dari tahun ke tahun. Kinerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota juga dapat diukur dari pelayanan yang diberikan kepada investor baik dalam proses perizinan dan non perizinan maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di

Kabupaten Lima Puluh Kota. Tolok ukur kinerja lainnya adalah dalam pelayanan perizinan yang diberikan kepada investor yang diukur dengan Idek Kepuasan Masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan terhadap capaian nasional/internasional.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Madani, Beradat, dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Visi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan RPJMN 2020-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2026.

3.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tantangan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan sarana prasarana yang representatif dalam upaya pencapaian optimalisasi pelayanan
- b. Dinamisasi dalam proses penyederhanaan operasional prosedur dalam upaya percepatan pelayanan perizinan
- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada semua bidang dalam peningkatan pelayanan penanaman modal

- d. Pemutakhiran instrumen , data dan regulasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan di DPMPTSP
- e. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Besarnya perhatian dan dukungan pemerintah dalam peningkatan pelayanan dan investasi
- b. Iklim usaha yang kondusif untuk memberikan peluang masuknya investasi
- c. Letak geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi yang baik
- d. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh aparatur daerah guna peningkatam pelayanan dan investasi
- e. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lo ka si	Indikat or Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikati f	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				183.982.700
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ka b. L i m a P u l u h K o t a	Tersedi anya Kebijak an di Bidang Penana man Modal sebany ak 2 Kebijak an	4 kebijaka n	75.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedian ya Kebijakan di Bidang Penanama n Modal sebanyak 2 Kebijakan	4 kebijakan	183.982.700
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				-	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				110.330.800
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Tersedi anya peta potensi investa si	-	-	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Tersedian ya peta potensi investasi	1 dokumen	110.330.800
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				

	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				185.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				317.282.100
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten	- Jumlah buku promosi produk unggulan.	100 buku. 100 souvenir	60.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Lima Puluh Kota	- Jumlah buku promosi produk unggulan. - Jumlah souvenir promosi produk unggulan	100 buku. 100 souvenir	73.926.700
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah pameran investasi Jumlah pameran pekan budaya dalam rangka mendukung potensi produk unggulan daerah	3 kali. 1 kali	125.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah pameran investasi Jumlah pameran pekan budaya dalam rangka mendukung potensi produk unggulan daerah	3 kali. 1 kali	243.355.400
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				235.000.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			212.748.000	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten	Pemanfaatan aplikasi perizinan elektronik berbasis teknologi informasi dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku	2 aplikasi	55.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota	Pemanfaatan aplikasi perizinan elektronik berbasis teknologi informasi dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku	2 aplikasi	49.464.000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kabupaten	Jumlah Pelayanan perizinan dan nonperizinan terhadap pelaku usaha skala usaha mikro/	3000 dokumen	140.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelayanan perizinan dan nonperizinan terhadap pelaku usaha skala usaha mikro/kecil dan skala	3000 dokumen	125.364.000

			kecil dan skala investasi (menengah/besar) yang memuaskan					investasi (menengah/besar) yang memuaskan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi terhadap tim teknis	24 orang	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi terhadap tim teknis	24 orang	37.920.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				122.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				101.470.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemantauan investor pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP	30 investor	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemantauan investor pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP	30 investor	63.310.000
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengawasan investor	50 perusahaan	57.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengawasan investor	50 perusahaan	38.160.000

		a Pu lu h Ko ta	r pelaksa naan penana man modal					pelaksana an penanama n modal		
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				16.215.000
	Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Jumlah laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	19 laporan	25.000.000	Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	19 laporan	16.215.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.500.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.500.000
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Dokumen Renstra dan Renja DPMPPTSP	2 dokumen	30.000.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Dokumen Renstra dan Renja DPMPPTSP	2 dokumen	30.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka b. Li m a Pu	Dokumen Sakip. Monitoring dan	6 dokumen	25.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Dokumen Sakip. Monitoring dan evaluasi	6 dokumen	25.500.000

		lu h Ko ta	evaluas i kegiata n dinas					kegiatan dinas		
	Administrasi Keuangan				3.884.0 45.505	Administrasi Keuangan				3.826.545.505
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Fasilita si pembe rian gaji . tunjang an dan insentif ASN	12 bulan	3.801.0 45.505	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Fasilitasi pemberia n gaji . tunjangan dan insentif ASN	12 bulan	3.801.045.505
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Tersusu nnya laporan kinerja SKPD	9 dokume n	65.000. 000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusun nya laporan kinerja SKPD	9 dokumen	10.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	- Tersusu nnya laporan keuang an bulana n /semes teran. - Tersusu nnya laporan keuang an	2 bulan. 12 bulan	-	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kab. Lima Puluh Kota	- Tersusun nya laporan keuangan bulanan /semester an. - Tersusun nya laporan keuangan bulanan / semesteran	2 bulan. 12 bulan	5.000.000

			bulana n/ semest eran							
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Tersusu nnya laporan progno sis dan realisas i anggar an	1 laporan	-	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusun nya laporan prognosis dan realisasi anggaran	1 laporan	5.000.000	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Tersusu nnya laporan keuang an akhir tahun	1 laporan	18.000. 000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusun nya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	5.500.000	
Administrasi Umum				640.600 .000	Administrasi Umum				847.142.294	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Lancar nya admini strasi perkant oran	12 bulan	4.000.0 00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya administra si perkantor an	12 bulan	4.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Ka b. Li m a	Lancar nya pemba yaran rek.	12 bulan	38.000. 000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya pembayar an rek. Telepon.	12 bulan	39.600.000	

	Pu lu h Ko ta	Telepo n. listrik dan interne t					listrik dan internet		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Tersedi anya pemba yaran surat surat kendar aan dinas	20 surat	6.600.0 00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedian ya pembayar an surat surat kendaraan dinas	20 surat	15.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Bertam bahnya motiva si dan semang at untuk bekerja	12 bulan	182.000 .000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota	Bertamba hnya motivasi dan semangat untuk bekerja	12 bulan	192.050.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Tercipt anya suasan a Kantor yang bersih	12 bulan	21.000. 000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Terciptany a suasana Kantor yang bersih	12 bulan	24.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Lancar nya proses pengad aan alat	12 bulan	34.000. 000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya proses pengadaa n alat tulis kantor	12 bulan	46.372.294

	lu h Ko ta	tulis kantor							
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Lancar nya proses pembia yaan barang cetak dan pengga ndaan	12 bulan	27.000. 000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya proses pembiaya an barang cetak dan penggandaan	12 bulan	36.140.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Berfun gsinya Alat- alat Listrik dan Penera ngan Kantor	12 bulan	5.000.0 00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Berfungsi nya Alat- alat Listrik dan Peneranga n Kantor	12 bulan	8.040.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Tersedi anya Makan Minum Rapat dan terlaya ninnya tamu	12 bulan	14.000. 000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedia nya Makan Minum Rapat dan terlayanin nya tamu	12 bulan	17.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ka b. Li m a Pu lu h	Terese dianya dana untuk koordin asi dan konsult asi	12 bulan	174.000 .000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Teresedia nya dana untuk koordinasi dan konsultasi	12 bulan	185.000.000

	Ko ta								
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Tersedi anya Kursi Kerja tersedi anya Meja Kerja	2 unit. 4 unit	19.000. 000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedian ya Kursi Kerja tersedian ya Meja Kerja	2 unit. 4 unit	75.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	tersedi anya laptop tersedi anya printer	1 unit. 5 unit	28.000. 000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	tersedian ya laptop tersedian ya printer	1 unit. 5 unit	19.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Jumlah kendar aan Dinas yang terpeli hara	20 unit	74.000. 000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihar a	20 unit	84.340.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Ka b. Li m a Pu lu h	Terpeli harany a perelat an gedung kantor	12 bulan	14.000. 000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Terpelihar anya perelatan gedung kantor	12 bulan	16.100.000

		Ko ta								
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Terlaks ananya sarana dan prasara na penunj ang fasilitas kantor	1 paket	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksan anya sarana dan prasarana penunjang fasilitas kantor	1 paket	85.000.000	
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				146.000 .000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				116.095.600	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Terlaks ananya pengad aan pakaian Dinas beserta kelengkap annya	52 stel	60.000. 000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksan anya pengadaa n pakaian Dinas beserta kelengkap annya	52 stel	30.000.000	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Terlaks ananya pengad aan pakaian Khusus hari hari tertent u	52 stel	60.000. 000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksan anya pengadaa n pakaian Khusus hari hari tertentu	52 stel	30.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ka b. Li m a Pu lu h	Mening katnya Kapasit as Sumber Daya Aparat ur	10 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Lima Puluh Kota	Meningka tnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10 orang	30.000.000	

		Ko ta								
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Ka b. Li m a Pu lu h Ko ta	Jumlah Pelak sanaan So sialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terkait dengan In vestasi	8 nagari	26.000. 000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaksana an So sialisasi Peraturan Perundan g- Undangan Terkait dengan Investasi	8 nagari	26.095.600	

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2020–2024, maka Visi BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2019-2024 yaitu: **“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Sedangkan misi BKPM mengacu pada 2 (dua) dan 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Kabinet Kerja yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM yaitu:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
2. Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal; dan
3. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani.

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan diatas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama DPM&PTSP daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM RI dapat digambarkan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP berdasarkan Sasaran
Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM	Anggaran terbatas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	Pemanfaatan Teknologi informasi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	<ul style="list-style-type: none"> - Imbas dari ketidakpastian ekonomi global yang ada secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat - Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai - Kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah yang harus diproduksi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun - Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor

		hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti		
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP - Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal - Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keputusan Gubernur mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPM & PTSP Sumatera Barat memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota diselaraskan dengan arah dan kebijakan BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini disusun berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2025 yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. **Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;**
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat dua misi penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu misi keempat dan ketujuh. Misi keempat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menyatakan Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata lewat usaha perdagangan dan industri kecil dan menengah serta ekonomi berbasis digital. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks peningkatan pertumbuhan investasi lewat peningkatan kualitas UMKM yang bermitra dengan Usaha Besar serta perumuskan kebijakan dalam penanaman modal yang memberikan kenyamanan berusaha dan memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel.

Misi ketujuh Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda

reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan e-Government, namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu OPD yang memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat terutama kepada pengusaha mulai dari Usaha Mikro sampai kepada pengusaha besar berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan e-Government yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pada tabel 3.2 (T.B.34) berikut dapat dilihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Baratterhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 3.2 (T.B.34)
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPM & PTSP
terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.				
No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital				
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Masih Rendahnya Realisasi Investasi Dibandingkan dengan Rencana investasi	- Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti - Kondisi alam Sumatera Barat	Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal

			<p>yang cenderung diidentikan dengan daerah rawan bencana gempa dan potensi tsunami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan masyarakat terhadap investor yang masih rendah - Kualitas dan kuantitas SDM modal yang masih sangat terbatas didalam melakukan pengendalian - Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM - Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan strategi promosi - Dukungan dana anggaran yang masih minim - Keterlibatan tenaga ahli masih kurang 	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua penerbitan izin sesuai dengan SOP dan Standar pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangan sehingga pelaksanaan perizinan terpadu masih terhambat secara administratif - Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keputusan Gubernur mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPM & PTSP Sumatera Barat memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses

			<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai - Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> perizinan - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan - Sudah adanya Standar Pelayanan dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan
--	--	--	--	--

3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026 ditetapkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

“Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Madani, Beradat, dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang ‘mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas

- unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian,perkebunan,peternakan, perikanan dan sumber daya alam lainnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan,Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta gerakan Pemberdayaan Perempuan,Gerakan Sayang Jumo.Bank Tanah Nagari.
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu,serta meningkatkan pemberdayaan Surau dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia.
 4. Peningkatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
 5. Jaminan Penjenjangan Karir dan Kesejahteraan PNS dan Perangkat Nagari.
 6. Peningkatan pembangunan berbasis Jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga Nagari,pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi Nagari dan Lumbung Piti Nagari, sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.
 7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antar umat beragama.
 8. Mewujudkan keberadaan kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi,

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 11 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi
8. Penguatan nagari
9. Penataan ruang dan kawasan strategis
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan

RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang

setiap tahunnya memiliki rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMD ke-3 (2016-2021) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian utamanya agribisnis berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta penerapan IPTEK secara luas. Bidang pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD tersebut adalah:

1. Pembangunan budaya
2. Pembangunan Hukum dan Tata-Pemerintahan
3. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia
4. Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
5. Pembangunan sarana dan prasarana.
6. Penataan ruang dan lingkungan hidup.

Jika ditinjau lebih jauh terhadap substansi dari bidang-bidang pembangunan tersebut, akan terlihat bahwa visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJMD ini sangat serasi dan mendukung sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD 2016-2021, terutama arahan pembangunan daerah pada periode ke-3 dari RPJPD tersebut.

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang terletak dengan posisi strategis perlu mewujudkan pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam. DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berusaha menarik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yaitu dengan memberikan informasi tentang potensi penanaman modal, pemberian pelayanan perizinan prima untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi dalam penyiapan pengembangan berbasis ekonomi kerakyatan.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana kerja DPMPTSP Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DPMPTSP tahun 2022-2026 yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu strategis penanaman modal. Adapun misi tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026 seperti tabel berikut.

Tabel 3.2

Misi, Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP

MISI	TUJUAN	SASARAN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan reformasi birokrasi 2. Meningkatkan inovasi daerah

Selain merupakan penjabaran Renstra DPMPTSP, maka Renja DPMPTSP tahun 2022 juga akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (RKPD) Tahun 2022. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan DPMPTSP.

Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan layanan mandiri, perbantuan dan prioritas dalam proses pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submissian (OSS) berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018
2. Belum tersedianya SOP dan SP pelaksanaan perizinan elektronik
3. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizininan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;
4. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai;
6. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidental dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan terutama dalam menjelaskan potensi

menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;

- . Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran Investor dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparatur berkaitan dengan aktivitas investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti. Lemahnya penegakan hukum terutama yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga menjadi salah satu kendala yang menurunkan intensi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Keterbatasan sumberdaya keuangan daerah, dan karena berbagai alasan prioritas pembangunan lainnya belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2022 disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan DPMPTSP

Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2022 direncanakan berjumlah 7 Program dan 13 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 7.530.578.010

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu meningkatkan nilai investasi dan realisasi investasi dan meningkatkan Indeks Kepuasan . Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan diarahkan pada perencanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, administrasi keuangan, administrasi umum, peningkatan disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Perangkat Daerah . Program ini diarahkan pada capaian indikator kinerja Meningkatnya nilai LAKIP dan Skor IKM dengan target capaian 70,99 (A)
- b. Program Promosi Penanaman Modal. Kegiatan diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota dengan indicator kinerja peningkatan nilai rencana investasi dengan target capaian rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar
- c. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kegiatan ini diarahkan pada Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar

- d. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Program ini kegiatannya diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas /insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota dengan indicator kinerja peningkatan nilai rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal . Kegiatan diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan indicator kinerja peningkatan nilai rencana investasi dan peningkatan nilai realisasi investasi dengan target capaian nilai rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar dan nilai realisasi investasi mikro kecil 70 milyar dan menengah besar 90 milyar.
- f. Program Pelayanan Penanaman Modal . Kegiatan diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan indicator kinerja peningkatan jumlah investor dan target capaian PMA 1, PMDN 10 , mikro kecil 3.000.
- Guna tercapainya target indikator tersebut, terlampir Rencana Kerja Program dan Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif tahun 2022 serta perkiraan maju tahun 2023 sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023

TABEL TC.3.3

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Lima Puluh Kota

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7,530,578,010			8,933,328,526			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,966,080,510			6,744,792,586			
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					97,554,900			120,892,500			
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terealisasinya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,017,500
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terealisasi nya dokumen RKA- SKPD		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,625,000
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terealisasinya dokumen perubahan RKA- SKPD		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,625,000

2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terealisasinya dokumen penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8,625,000
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terealisasinya dokumen penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5,916,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10,000,000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan realisasi kinerja DPMPSTP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	11,376,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15,000,000
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	29,762,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 dokumen 35,000,000
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,336,459,710		4,825,322,564
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Fasilitasi pemberian gaji, tunjangan dan insentif ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	4,315,568,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 4,808,322,564

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.02	05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		<i>Terealisasinya Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP</i>		<i>Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>		<i>1 laporan</i>		<i>7,747,000</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			<i>10,000,000</i>	
2	18	01	2.02	07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>		<i>Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran</i>		<i>Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>		<i>2 bulan / 12 bulan</i>		<i>7,284,600</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			<i>0</i>	
2	18	01	2.02	08	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>		<i>Terealisasinya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>		<i>Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>		<i>1 laporan</i>		<i>5,895,200</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			<i>7,000,000</i>	
2	18	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>							<i>34,016,000</i>				<i>40,000,000</i>		
2	18	01	2.05	11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		<i>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>		<i>Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>		<i>10 orang</i>		<i>34,016,000</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>			<i>40,000,000</i>	
2	18	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>							<i>290,839,900</i>				<i>419,140,522</i>		

2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Berfungsinya Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		9,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya alat tulis kantor		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		31,042,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,090,522
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor yang memadai		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat kebersihan kantor		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,700,000

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Kelu aran Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terwujudnya pelayanan adm perkantoran yg baik		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		34,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			37,950,000	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		peningkatan wawasan dan informasi sumber daya Aparatur		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,400,000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terlaksananya pelayanan tamu kantor dengan baik		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	22,000,000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi baik didalam maupun diluar daerah		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		185,051,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	275,000,000	

2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya absensi elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,000,000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						509,951,000					550,000,000
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan dinas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit				409,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			440,000,000
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mobiler kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket				49,901,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1paket	55,000,000
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya laptop, printer, PC	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit				50,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						247,140,000				294,437,000	

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		lancarnya administrasi perkantoran		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		5,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,445,000	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Lancarnya penyediaan telepon, internet, sumber daya air dan listrik				12 bulan		45,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			47,916,000	
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		bertambahnya motivasi dan semangat untuk bekerja terciptanya suasana kantor yang bersih		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		196,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			241,076,000	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								450,119,000				495,000,000	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terawat dan terpeliharanya kendaraan dinas		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	143,000,000	

2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya peralatan rumah tangga		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22,000,000
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tersedianya ruang rapat kantor		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 bulan		300,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				330,000,000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							329,440,300					696,327,100	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							239,142,400					393,340,100	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Meningkatnya Nilai Rencana Realisasi Investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kebijakan		176,750,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				295,000,000
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		jumlah pelaksanaan Sosialisasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan C005 6han		6 Pertemuan		62,391,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Nagari		98,340,100
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							90,297,900					302,987,000	

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Memudahkan Investor untuk Memperoleh Informasi Potensi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		90,297,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				302,987,000
2 18 03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						323,552,100						380,738,520
2 18 03 2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						323,552,100						380,738,520
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Terlaksananya Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		75,196,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				88,712,040
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pameran Pekan Budaya Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan GPTUI/GPID/Forum Investasi/One on One Meeting Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Produk Unggulan Daerah		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 4 kali 2 kali		248,355,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				292,026,480
2 18 04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						419,976,700						493,664,640
2 18 04 2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						419,976,700						493,664,640

2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	pemanfaatan aplikasi perizinan elektronik berbasis teknologi informasi dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (OSS dan SICANTIK)		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Aplikasi	68,933,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				79,272,950
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pelayanan perizinandannon perizinan terhadap pelaku usaha skala usaha mikro/ kecil dan skala investasi (menengah/ besar) yang memuaskan		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1100 dokumen	149,137,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				171,507,665

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.00 DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		<i>Fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat yang memuaskan</i>		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Pengaduan		60,525,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69,603,865
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		<i>terlaksananya koordinasi dan fasilitasi terhadap tim teknis PTSP yang merupakan representasi perangkat daerah instansi teknis dalam proses perizinan dan non perizinan penanaman modal (investasi) secara terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kali		141,381,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				173,280,160
2 18 05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						426,808,000					540,141,200	
2 18 05 2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						426,808,000					540,141,200	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		<i>Terlaksananya pemantauan penanaman modal</i>		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Investor		73,660,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90,000,000

2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya pembinaan bagi pelaku usaha Terlaksanya bimbingan teknis ketentuan penanaman modal dan kemudahan berusaha		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Perusahaan 60 Perusahaan		216,522,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,000,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya pengawasan penanaman modal		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Perusahaan		136,625,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,141,200
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							64,720,400					77,664,480	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							64,720,400						77,664,480
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 laporan		64,720,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				77,664,480
TOTAL												9,030,578,010					8,933,328,526	

Dalam peningkatan investasi atau penanaman modal pada daerah harus dipikirkan berkelanjutan sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif dan merupakan suatu hal mutlak yang diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Arah peencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang tersebut harus termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dimana biaya pembuatannya sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta rupiah).

Guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di sector pariwisata atau pun di sector pertanian perlu dilakukan Feasibility Study (FS) . Untuk satu FS membutuhkan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

BAB V

PENUTUP

RENJA DPMPTSP Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA DPMPTSP Tahun 2016-2021 DAN RPJM Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota serta target dan Sasaran Pembangunan yang telah disusun dapat tercapai.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2020 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2020.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur DPMPTSP berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2020, dimana RENJA Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP, seluruh aparatur DPMPTSP secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2020.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2020 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencanapembangunan jangka panjang daerah , rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah..
5. Renja Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan

memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

